

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NI KMG.TRI PURWATI
NPP. 29.1467

*Asdaf Kabupaten Doanggala Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: 29.1467@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (GAP): In accordance with Presidential Instruction No. 10 of 2018 related to the acceleration of rehabilitation and reconstruction after the Donggala earthquake, the target for completion is that the construction of community houses will be completed in December 2019, but until 2021 the rehabilitation and reconstruction program has not yet been completed. in Donggala Regency. **Purpose:** this study aims to determine the implementation of local government policies (BPBD on the post-earthquake rehabilitation and reconstruction program in Donggala Regency. **Method:** Research conducted using descriptive qualitative method Data collection was carried out through direct observation to the research location, interviews with 12 respondents as well as evidenced by documentation data. **Results/findings:** The results showed that in The implementation of program policies must pay attention to the factors that can affect the success or failure of a program, in this study human resources were not effective, the character of the implementers was partly inappropriate, the attitude adopted was standard and poor communication between implementers. From this, obstacles emerged that hindered the program completion process, namely data collection, funding, and even obstacles to implementation. So that BPBD makes policies, one of which is to facilitate the public in the administrative process so that they have complete data. **Conclusion:** In general, the implementation of the Post-earthquake Rehabilitation and Reconstruction Program Policy Implementation in Donggala Regency, there are obstacles that hinder the completion of program implementation, so that the program has not run well and there are still many problems in the field. As is the case in data collection that is not carried out properly, causing several times to re-collect data from the Government to the community, and there are still many shortcomings that need to be considered to be corrected. The stages of implementing the Rehabilitation and Reconstruction Program of course begin with socialization and reconstruction, rebuilding and accountability.

Keywords: policy, rehabilitation and reconstruction

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Sesuai dengan Inpres No.10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah (BPBD terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Donggala. **Metode:** Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan jumlah responden 12 orang serta yang dibuktikan dengan data dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah program, dalam penelitian ini sumber daya manusia tidak efektif, karakter pelaksana sebagian tidak tepat, sikap yang diambil standar serta komunikasi yang kurang baik antar pelaksana. Dari hal tersebut muncul kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian program yaitu pendataan, pendanaan, bahkan kendala pada pelaksanaannya. Sehingga BPBD membuat kebijakan salah satunya untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi agar memiliki data lengkap. **Kesimpulan:** Secara umum pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Tahapan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi tentunya dimulai dengan sosialisasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggungjawaban.

Kata Kunci: kebijakan, rehabilitasi dan rekonstruksi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gempa bumi yang terjadi berpusat di Kabupaten Donggala memicu terjadinya longsoran dasar laut (submarine landslide) dengan mekanisme gempa bumi mendatar (sinistral). Patahan gempa yang terjadi menyebabkan terjadinya longsoran diantaranya tanah amblas, terjadinya perubahan muka pantai secara drastis, banyaknya pohon kelapa yang tumbang, terbelahnya tanah di pantai Lero, Marana, Enu hingga Labean. Selain peristiwa tersebut gempa bumi juga disertai dengan Tsunami yang terjadi di beberapa titik wilayah salah satunya Desa Loli saluran dengan ketinggian air mencapai 9,6 meter dari mean sea level dengan inundasi jarak pendek 106 meter dan tertahan bukit Loli.

Pemulihan bencana merupakan langkah yang sangat penting dalam memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana, dengan tujuan membangun kembali kehidupan manusia dengan cara mengurangi kepekaan dan meningkatkan kemampuan dalam menghindari resiko masa depan terhadap bencana alam. Pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Penerapan rekonstruksi dan rehabilitasi mengenai berbagai pihak yang menyediakan dana baik dari Pemerintah pusat melalui badan penanggulangan bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah melalui badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD).

Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan disusul dengan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah yang terkena dampak bencana, kementerian ATR /BPN bersama kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah yang ikut bekerja bersama sesuai peran dan tugas pokok fungsinya. Rekonstruksi di wilayah Sulawesi Tengah sudah terlihat bahwa adanya berbagai aspek kendala dari beberapa macam hal. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemecahan masalah yang tepat agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian paling lambat Desember 2019. Kemudian, untuk rumah masyarakat paling lambat agustus 2019.

Di wilayah Kabupaten Donggala hampir seluruh Kecamatan terkena dampak dari bencana gempa bumi di antaranya 12 Kecamatan yang terkena dampak dan 1 Kecamatan yang bersih dari kerusakan akibat bencana gempa. Seperti Kecamatan Rio Pakava ada 47 rumah rusak berat, 44 rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Sementara itu di Desa Banawa Selatan 672 rumah rusak berat, 458 rusak sedang dan 1,408 rusak ringan. Kecamatan Banawa Tengah 770 rumah rusak berat, 500 rusak sedang dan 770 rusak ringan. Kecamatan Banawa 915 rumah rusak berat, 695 rusak sedang dan 884 rusak ringan. Kecamatan Tanantovea sebanyak 630 rumah rusak berat, 274 rusak sedang dan 630 rusak ringan. Kecamatan Labuan ada 864 rumah rusak berat dan 496 rusak ringan. Kecamatan Sindue 1031 rumah rusak berat, 832 rumah rusak sedang dan 933 rusak ringan. Kecamatan Sindue Tombusabora 407 rumah rusak berat, 436 rusak sedang dan 935 rusak ringan. Kecamatan Sindue Tobata 389 rumah rusak berat, 102 rusak sedang dan 247 rusak ringan. Kecamatan Sirenja 1253 rusak sedang dan 1641 rusak ringan. Kecamatan Balaesang 1052 rumah rusak berat, 151 rusak sedang dan yang terakhir ada Kecamatan Balaesang Tanjung terdapat 866 rumah rusak berat, 590 rusak sedang dan 396 rusak ringan.

Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Sulawesi Tengah 2018 masih berlangsung hingga saat ini. Namun pencairan dana stimulan untuk korban bencana dan pembangunan hunian tetap di Palu, sigi, dan Donggala belum rampung. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah Daerah mengenai dana stimulan maupun proses pembangunan hunian serta ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan data yang disampaikan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat bencana alam gempa bumi tersebut dengan mengambil judul penelitian : **“Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Sulawesi Tengah 2018 masih berlangsung hingga saat ini. Namun pencairan dana stimulan untuk korban bencana dan pembangunan hunian tetap di Palu, sigi, dan Donggala belum rampung. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah Daerah mengenai dana stimulan maupun proses pembangunan hunian serta ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam pemulihan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama adalah penelitian dengan judul “ implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Lombok Utara oleh Desy Lestari tahun 2020 ”. Kesimpulan peneliti adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah sehingga program tersebut belum selesai. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti yaitu terdapat perbedaan antara fokus wilayah penelitian serta bahan dalam penelitian.

Penelitian kedua yaitu dengan judul “Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pasca gempa bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat oleh Meita Lefi Kurnia pada tahun 2017”. Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu Penelitian ini membahas secara menyeluruh mulai dari penanggulangan hingga pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori Freies Ermessen Sedangkan peneliti melihat indikator berdasarkan teori implementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pasca gempa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2017) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti

menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Pada penelitian ini penulis memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi, (2016) dimana indikator pengukuran implementasi meliputi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana dan komunikasi antara organisasi dengan aktivitas pelaksana.

A. SUMBER DAYA

- Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan pelaku atau pelaksana suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal ini tentu melihat kebijakan dari penanggulangan pasca bencana gempa bumi Kabupaten Donggala.
- Sumber daya manusia pada tingkat Pemerintah Daerah sudah berkualitas. Setiap pegawai dituntut untuk memahami program rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan juknis yang ada. Seperti tabel dibawah ini bahwa kualitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Donggala rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini diukur berdasarkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Donggala di instansi BPBD dalam menyelenggarakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dilakukan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Donggala tentunya bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan apabila dilihat dari sumber daya manusia pada tingkat masyarakat Kabupaten Donggala yang juga sebagai pelaksana program (pokmas), tingkat masyarakat yang dimiliki masyarakat Kabupaten Donggala itu rata-rata menegah kebawah sehingga dapat dikatakan untuk kuantitas pelaksana bencana bisa terpenuhi akan tetapi sumber daya manusia dengan kualitas dan keahlian dibidang program rehabilitasi dan 57 rekonstruksi menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia untuk memahami program tersebut dirasa masih kurang karena selama ini kesadaran masyarakat maupun Pemerintah Daerah tentang pentingnya keahlian memahami program masih belum cukup tinggi. Namun hal tersebut tentunya tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan program karena bagaimanapun sumber daya manusia yang ada tentunya akan dimaksimalkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

B. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DONGGALA

- Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan program dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana. Kinerja implementasi kebijakan organisasi pelaksana tersebut dipengaruhi oleh karakter-karakter implementasi seperti kompetensi dan ukuran serta cocok dengan para agen pelaksana program. Hal tersebut akan berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

- karakter dari masyarakat belum tepat dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi karena kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Donggala pada umumnya masih kurang sehingga dalam memahami program dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan dampingan dari fasilitator. Dengan demikian karakteristik yang dimiliki oleh para agen pelaksana bisa dilihat dalam dua kategori pelaksana yang memiliki karakteristik cocok dan tidak cocok dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Agen pelaksana dikatakan tepat dan cocok dilihat sistem birokrasi baik itu agen pelaksana yang ada ditingkat Pemerintah desa maupun Pemerintah Daerah.
- Pemerintah dikatakan sebagai pelayan masyarakat atau yang memfasilitasi masyarakat dalam pelaksana program tentu harus bekerja sesuai pola yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Sedangkan berbeda halnya dengan karakteristik dari masyarakat atau pokmas bisa dikatakan kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak secara aktif mengetahui program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dan masyarakat hanya bisa menunggu dan menerima bantuan yang datang.

C. SIKAP DAN KECENDERUNGAN PARA PELAKSANA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI

- Implementasi program kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi tahun 2020, dalam pelaksanaannya juga melihat pada sikap dan kecenderungan dari para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana tentu bisa menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan program dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Dengan demikian peneliti ingin melihat sikap dan kecenderungan selaku pengambil keputusan sekaligus implementasi sikap dari BPBD Kabupaten Donggala.
- Dari pernyataan narasumber diatas yang mengatakan sudah 80% rumah masyarakat hampir selesai pembangunan RTG dalam kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dimana pada data awal rumah masyarakat yang rusak sebanyak 21.378 unit rumah, mengingat sudah 3 tahun program tersebut berjalan namun masih ada rumah masyarakat yang belum di proses atau belum selesai dilakukan sehingga peneliti meninjau lebih jauh terkait pelaksanaan dari implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala.
- Organisasi pelaksana baik itu BPBD dan Pemerintah Kabupaten Donggala menerima setiap kebijakan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dasar aturan yang sudah ditetapkan. BPBD dan Pemerintah Kabupaten Donggala menerima kebijakan yang telah ditetapkan sehingga intensitas terhadap kebijakan yang dilakukan terlaksana. Setiap organisasi pelaksana tentu juga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI PELAKSANA DAN AKTIVITAS PELAKSANA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- Implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala tentu sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dilihat dari sejauh mana komunikasi yang terjalin antar para pelaksana. Komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana harus jelas

tepat dan juga konsisten sehingga nantinya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Implementasi yang efektif tentu akan terjadi apabila para implementor mengetahui apa yang dilakukan.

- Peneliti menemukan bahwa dari informasi diatas komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dan BPBD juga terkadang miss komunikasi khususnya dalam pendataan. Ketika SK sudah keluar banyak nama-nama masyarakat yang muncul sedangkan dilapangan kondisi rumahnya tidak sesuai dengan aturan sehingga Pemerintahdesa mengusulkan kembali nama-nama masyarakat yang hilang dari pemantauan BPBD untuk dialihkan ke tahap II pembangunan dari program kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun data dari jumlah masyarakat yang diusulkan kembali oleh Pemerintah Desa sebanyak 21.379 rumah dalam semua kategori (rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan).

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaharuan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan dengan judul “ implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Lombok Utara oleh Desy Lestari tahun 2020 ”. Kesimpulan peneliti adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah sehingga program tersebut belum selesai. Kebaharuan hasil penelitian penulis yaitu penulis menggunakan indikator komunikasi yang tidak dibahas pada penelitian tersebut. Dimana komunikasi sangat berpengaruh. Penulis mendapati bahwa Implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala tentu sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dilihat dari sejauh mana komunikasi yang terjalin antar para pelaksana. Komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana harus jelas tepat dan juga konsisten sehingga nantinya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Implementasi yang efektif tentu akan terjadi apabila para implementor mengetahui apa yang dilakukan.

Kemudian, perbedaan penting yang menunjukkan temuan utama penulis yang mencerminkan kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan dengan judul “Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pasca gempa bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat oleh Meita Lefi Kurnia pada tahun 2017”. Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu Penelitian ini membahas secara menyeluruh mulai dari penanggulangan hingga pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori Freies Ermessen Sedangkan peneliti melihat indikator berdasarkan teori implementasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pasca gempa oleh PemerintahDaerah Provinsi Sumatera Barat.

Temuan utama yang menunjukkan kebaharuan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa sikap dan kecenderungan pelaksana sangat mempengaruhi proses penanggulangan bencana. sikap dan kecenderungan dari para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana tentu bisa menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan program dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Dengan demikian peneliti ingin melihat sikap dan

kecenderungan selaku pengambil keputusan sekaligus implementasi sikap dari BPBD Kabupaten Donggala.

IV. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Donggala terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Fakta yang ada di lapangan ternyata menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan sejumlah ketidakberhasilan dalam proses Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi diantaranya kurang perhatian yang kurang telitnya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

DESY, L. (2021). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 2020. <http://repository.ummat.ac.id/2177/87> Hoffmann, 2009. (2009). Metode Penelitian. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(9), 1689–1699.

Deddy Mulyadi, (2016) Studi kebijakan publik dan Pelayanan publik , Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta

Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Pagaruyung Law Journal, 1(1), 76-91.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta